

## Pemersatu Antar Negara; Perdamaian Dunia Yang Diimpikan

Irsyam Fajar Attaulloh<sup>1\*</sup>, Gunawan Wibisono<sup>2</sup>, Febiansyah<sup>3</sup>, Gunawan Santoso<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Corresponding author: [fajarseptember30@gmail.com](mailto:fajarseptember30@gmail.com)

**Abstrak** - Dalam suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri, seperti halnya individu sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan Negara atau komponen yang lain. Bahkan adapula Negara yang memiliki keterkaitan serta ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jika adanya keterkaitan antar Negara dengan Negara lain tersebut tentunya ada sebuah hubungan yang baik. Salah satunya merupakan Negara kita sendiri yaitu Negara Indonesia dengan Negara-negara lain. dinamakan masyarakat global, ditandai adanya saling ketergantungan antar bangsa, adanya persaingan yang ketat dalam suatu kompetensi dan dunia cenderung berkembang kearah perebutan pengaruh antar bangsa, baik lingkup regional maupun lingkup global. Namun pada kenyataannya masih banyak hubungan yang bertentangan antara Negara satu dengan Negara yang lain. Yang mengakibatkan terjadinya konflik dan terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama maupun kebudayaan. terjadinya konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dan mengerti antara satu dengan yang lain. Dari masalah diatas dalam makalah ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perdamaian dunia itu sendiri dan cara mewujudkan perdamaian dunia serta partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia. Keywords: Perdamaian Masyarakat Global.

**Kata Kunci:** *Perdamaian Masyarakat Global.*

**Abstract** - In a country cannot stand alone, just like individuals as social beings. Of course, the state will need a state or other components. In fact, there are countries that have links and dependencies in economic, social and political aspects. If there is a relationship between countries and other countries, of course there is a good relationship. One of them is our own country, namely Indonesia and other countries. It is called a global society, characterized by interdependence between nations, there is intense competition in competence and the world tends to develop towards a struggle for influence between nations, both regionally and globally. But in reality there are still many contradictory relations between one country and another. Which resulted in conflict and disturbing world peace. Conflicts are usually triggered by problems in social, economic, political, religious or cultural terms. the occurrence of conflict due to greed, lack of mutual respect and understanding between one another. From the problems above, this paper will discuss what is meant by world peace itself and how to achieve world peace and Indonesia's participation in world peace. Keywords: Global Community Peace.

**Keywords:** *Global community peace*

## Pendahuluan

Perdamaian tidak akan bisa dicapai secara instan. Untuk mencapainya perlu perkembangan dan proses berkelanjutan. Tanpa adanya perdamaian, kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik tidak mungkin tercapai. Hal ini dikarenakan tidak adanya sikap toleransi yang memungkinkan keharmonisan dan kerjasama sosial antar masyarakatnya. Toleransi sendiri adalah menghargai perbedaan dan kemampuan untuk hidup dan membiarkan orang lain hidup dengan hidupnya. Toleransi merupakan kemampuan untuk memberikan sikap yang objektif dan adil pada pendapat, perilaku, ras, dan agama yang berbeda. Bukan hanya sekedar tidak memperdulikan perbedaan, toleransi lebih mengarahkan manusia untuk menunjukkan rasa hormat pada perbedaan tiap tiap manusia. Toleransi merupakan salah satu kunci utama dalam memelihara perdamaian dan menjauhi konflik dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf, 2013). Dengan adanya toleransi bahkan ketika ada konflik, kelompok yang berkonflik akan menahan rasa sakit masa lalu dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Perpecahan dan konflik pasti akan terlahir tanpa adanya sikap toleransi.

Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan berbagai macam perbedaan. Lokasi hidup, agama yang dianut, pendidikan, keadaan sosial akan membentuk karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai hidup yang berbeda sangat rentan menimbulkan sebuah kesalahpahaman dalam komunikasi tanpa adanya toleransi akan perbedaan. Hanya dengan rasa saling percaya masyarakat dapat membangun perdamaian. Rasa saling percaya harus dibangun dengan pendidikan karakter yang mendukung rasa pengertian, toleransi, saling hormat, dan komunikasi. Bibit-bibit perdamaian dan toleransi beragama ini harus ditanamkan sejak dini didalam diri anak-anak, agar generasi penerus bangsa yang terbentuk adalah generasi cinta damai.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library reseach) dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, jurnal, lifet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian, (Syahputra M.R. dan Darmansah 2020:21 studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

Dunia ini memiliki banyak negara yang berdiri di atasnya sehingga memiliki banyak kebudayaan, tradisi, kebiasaan, pandangan hidup, dan keberagaman lainnya. Keberagaman tersebut menyebabkan munculnya diferensiasi-diferensiasi tertentu dalam masyarakat, misalnya berdasarkan sosiokulturalnya terdapat diferensiasi suku, agama, klan, dan profesi (Uswatun Hasanah & Nadiroh, 2017). Seperti yang telah diketahui, bahwa keberagaman merupakan salah satu

faktor yang dapat menyebabkan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Untuk menghindari gesekan atau pergolakan seperti sebelumnya yang memungkinkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat global, maka pada tahun 1919 dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) untuk membantu menjaga perdamaian dunia. Dengan dibentuknya LBB diharapkan semua negara akan menjadi anggota LBB dan dapat menyelesaikan sengketa-sengketa melalui negosiasi terlebih dahulu tanpa melalui jalur kekerasan. Pada masa awal pembentukannya, LBB berjalan dengan baik, namun dalam perkembangan selanjutnya, LBB gagal dengan beberapa alasan, yaitu tidak semua negara bergabung dalam LBB, tidak memiliki aturan hukum yang kuat untuk mencegah konflik, tidak memiliki tentara serta lamban mengambil tindakan (Ratna Hapsari & M. Adil, 2014). Kegagalan LBB menjadi salah satu terjadinya Perang Dunia II pada tahun 1939. LBB pun dibubarkan pada tahun 1945 dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 24 Oktober 1945 dengan salah satu tujuannya yang sama dengan LBB, yaitu menjaga perdamaian dunia. PBB saat ini memiliki 193 anggota salah satunya adalah Indonesia.

Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Kita*, menegaskan bahwa dalam paragraf Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Pernyataan ini yang lahir dari penderitaan sendiri, tidak saja menentukan politik kedalam tetapi mempengaruhi juga politik luar negeri Republik Indonesia.” Dalam alinea keempat diperkuat pendapat itu dengan meletakkan kewajiban atas pemerintah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di sini pula terletak dasar fundamental dari pada politik luar negeri Republik Indonesia yang terkenal sebagai politik bebas dan aktif (Muharudin, 2009). Politik bebas dan aktif maksudnya Indonesia bebas untuk menjalin kerja sama dengan negara manapun, serta turut aktif dalam organisasi internasional untuk bekerja sama dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Hatta pula, tujuan politik bebas dan aktif tersebut antara lain mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian dunia, dan mempererat persaudaraan antarbangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia menjalankan yang pokok-pokoknya dapat dituliskan sebagai berikut (Muharudin, 2009) : 1. Politik damai 2. Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar harga-menghargai, dengan tidak mencampuri soal struktur dan corak pemerintah negerinya masing-masing. Khususnya mengadakan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, yang kebanyakan mengalami nasib yang sama dengan Indonesia di masa lalu 3. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin

perdamaian yang kekal 4. Berusaha mempermudah jalannya pertukaran dan pembayaran internasional 5. Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional, dengan berpedoman kepada Piagam PBB 6. Berusaha dalam lingkungan PBB mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa yang sampai sekarang negerinya masih jajahan, karena dengan tidak adanya kemerdekaan tak akan tercapai persaudaraan dan perdamaian internasional Untuk mewujudkan partisipasi dalam menjaga perdamaian dunia, Indonesia pertama kali tergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB) yang dibentuk pada saat Perang Dingin antara Blok Barat yang menganut ideologi liberalisme dengan Blok Timur yang menganut ideologi komunisme.

Pada saat itu, Indonesia bersama negara-negara dunia ketiga lainnya bersatu untuk membentuk GNB sekaligus menyatakan bahwa anggota-anggota GNB bukanlah negara yang memihak blok manapun. Kemudian, pada tanggal 23 Januari 1973, berdasarkan tercapainya Persetujuan Perdamaian Paris, Republik Demokrasi Vietnam dan Amerika Serikat secara resmi meminta Indonesia dalam ICCS (International Commission for Control and Supervision) yakni suatu komisi pengawasan gencatan senjata di Vietnam Selatan bersama Polandia, Hongaria, dan Kanada (Kanada kemudian menarik diri dan digantikan oleh Iran). Untuk memenuhi kesanggupan Pemerintah RI sebagai anggota ICCS, maka dibentuklah Misi Republik Indonesia Garuda (Misriga). Sebagai Ketua ditunjuk Duta Besar Indonesia untuk Khmer Letnan Jenderal TNI H. R. Dharsono.

Misriga dalam melaksanakan tugasnya melakukan observasi, investigasi, analisis, laporan, negoisasi, yang mencakup bidang politik, hukum dan militer (Makhrus Nur Faqih & Coory Liana, 2014). Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan anggota PBB berkomitmen seperti pada tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB, khususnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Partisipasi Indonesia pada UN Peacekeeping Operation berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, UU Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UN Charter.<sup>12</sup> Sejarah pasukan penjaga perdamaian Indonesia/Pasukan Garuda (Kontingen Garuda/Konga) dimulai dengan pengiriman misi pertamanya, yaitu Kontingen Garuda I pada tahun 1957 ke Mesir (UNEF) di Timur Tengah. Selanjutnya pengiriman Kontingen Garuda setingkat batalyon di Kongo, yaitu Kontingen Garuda II pada tahun 1960-1961 dan Kontingen Garuda III di tahun 1963-1964. Lalu Kontingen Garuda IV pada tanggal 7 April 1973, Kontingen Garuda V pada tanggal 23 Juli 1973, dan Kontingen Garuda VII ke Vietnam untuk melakukan pengawasan terhadap gencatan senjata. Kemudian Kontingen Garuda VI pada tahun 1973-1974 dan Kontingen Garuda VIII pada tahun 1974-1979 ke Mesir. Selanjutnya, Kontingen Garuda XII pada tahun 1992-1994 ke Kamboja, lalu Kontingen Garuda XIV di tahun 1995 ke Bosnia, dan Kontingen Garuda XXIII/UNIFIL di tahun 2006-2015 ke Lebanon. Kontingen Garuda lainnya merupakan pengamat militer di berbagai misi PBB

di dunia, termasuk Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI, yang menjabat sebagai Chief Military Observer pada Kongra XIV di Bosnia (UNTAES, 1995-1996). Selain itu, peran lain Indonesia dalam UN Peacekeeping Operation ialah Indonesia telah mengirimkan kapal lautnya, yaitu KRI Diponegoro sejak 2009 untuk bergabung dengan Maritime Task Force (MTF) of the UNIFIL di Lebanon. Beberapa posisi high ranking officials di UNIFIL juga telah dipercayakan kepada Indonesia, yaitu Chief of Staff of the Maritime Task Force (MTF) dan Deputy Commander Sector East di UNIFIL. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam UN PKO di kawasan Amerika, yaitu pada UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)

(Leonard F. Hutabarat, 2016). Sejauh ini Indonesia juga berkomitmen mengirimkan UN Female Peacekeepers dalam berbagai misi PBB, seperti pada tahun 2016 merupakan puncak pengiriman personil wanita terbesar Indonesia sejak tahun 2009-2016, dimana personil wanita banyak dikirimkan dalam misi UNIFIL di Lebanon hingga Desember 2016 (Leonard F. Hutabarat, Peningkatan Female Peacekeeper Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, 2017). Jadi, sejauh ini Indonesia telah banyak berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia sekaligus dalam rangka penyelenggaraan politik luar negeri yang dianut, yaitu politik luar negeri bebas dan aktif. Seiring berkembangnya zaman dan semakin meluasnya era globalisasi, diharapkan Indonesia dapat terus berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia serta tetap melakukan kerja sama dan menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan negara-negara lain.

Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh Negara dan bangsa. Perdamaian Dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis, dan Britania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Namun, Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu. Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua pengertian. Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan. Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik. Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung. Batasan seperti ini terlalu minimalis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik semata. Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ. Perdamaian bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti

kekerasan. Lebih jauh dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif nonkekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.

Pendekatan cultural dalam perdamaian dunia Paradigma Pendidikan Karakter memang tergolong isu baru, seiring dengan banyaknya penelitian yang dilakukan yang memicu meningkatnya kesadaran di dunia pendidikan dalam skala internasional bahwa ternyata membentuk karakter individu jauh lebih penting daripada meningkatkan intelektualitas itu sendiri. Pendidikan karakter akan menciptakan manusia yang lebih utuh dan unggul secara mental, sehingga bukan hanya membuat pribadi yang bersangkutan menjadi lebih tangguh dan kompetitif, tetapi juga bisa memedarkan resonansi positif bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga kualitas dari sektor sumber daya manusia suatu bangsa akan meningkat secara menyeluruh. Sesungguhnya pesan pendidikan karakter telah tersirat dalam bait lagu kebangsaan Kita “bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya” yang kembali membuka mata Kita bahwa ini merupakan pesan yang cukup jelas dari para founding fathers Kita tentang pentingnya membangun karakter bangsa ini. Di era globalisasi mutli dimensi sekarang ini, Kita bisa melihat bagaimana negara-negara dengan penduduk yang berkarakter positif menjadi lebih maju dan kuat, baik secara ekonomi, politik, budaya dan kesadaran hukumnya. Di lain pihak, Kita mengamati kondisi aktual dari bangsa kita sendiri, Kita menyaksikan bagaimana dekadensi moral lintas generasi yang serius telah terjadi secara masif pada bangsa ini di hampir semua sektor, korupsi terjadi pada hampir semua lembaga dan instansi baik negeri maupun swasta, konspirasi yang menyelewengkan uang negara antara executive dan legislatif terjadi diberbagai daerah, maraknya mafia peradilan, jual beli hukum yang membuat rasa keadilan semakin jauh dirasakan masyarakat, begitupun dengan generasi muda Kita, kenakalan remaja, pelajar bahkan mahasiswa, banyaknya pemerkosaan brutal dibawah umur baik korban maupun pelakunya, pornografi, peredaran narkoba yang seolah tak pernah bisa dibasmi secara tuntas dan lain sebagainya, sangat dominan menghiasi halaman berita diberbagai media. Sungguh sebuah ironi yang sangat dramatis bagi sebuah bangsa besar dan memiliki cita-cita besar, sebuah Bangsa yang dulu secara internasional dikenal dengan istilah Nusantara yang dikenal sejarah memiliki alam yang indah dan subur dengan penduduk yang memiliki karakter, budaya dan adat istiadat yang berbudi pekerti luhur dan mulia. Perdamaian atau resolusi konflik dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Tidak ada suatu cara yang dapat menyelesaikan semua konflik. Setiap konflik punya keunikan tersendiri.

Resolusi konflik yang lazim dilakukan ialah : Emil Durkheim menyatakan masyarakat yang terikat secara tali temali (Cross-Cutting Affiliation) cenderung damai dan punya daya tahan terhadap konflik. Sedangkan masyarakat yang tidak ada cross-cutting affiliation cenderung terlibat dari suatu konflik ke konflik lainnya. Contoh, masyarakat Sumenep dan Situbondo yang mayoritas suku Madura. Di Sumenep hampir tidak terjadi konflik, karena ada ikatan tali temali antara orang Madura dan orang Tionghoa. Secara historis, nenek moyang mereka campuran Madura dan Tionghoa. Putri Koneng, ibu dari Jokotole, adalah orang Tionghoa. Di Keraton Sumenep sampai sekarang masih bisa dilihat ukiran naga dan burung phoenix, artinya ada pertalian budaya Madura dan Tionghoa. Sebaliknya di Situbondo acapkali terjadi konflik (pembangunan jalan Anyer-Panarukan, Perang Blambangan, kerusuhan 10 Oktober 1996, dsb). Hal ini disebabkan Situbondo tidak ada cross-cutting affiliation. Ada orang Madura, Islam NU, petani atau nelayan. Ada orang Jawa, Islam Muhammadiyah, pegawai negeri. Ada orang Tionghoa, Kristen, pedagang. Jadi ada segregasi etnis/suku, agama, dan mata pencaharian.

Menurut Durkheim, masyarakat yang memiliki cross-cutting affiliation akan berlanjut pada cross-cutting loyalties. Pada gilirannya masyarakat seperti ini akan berada dalam situasi damai. Menurut Max Weber, agama seharusnya menjadi sentra / pusat perdamaian. Namun di dalam agama terdapat unsur yang disebut magics / politics yang memanipulasi perintah Tuhan untuk kepentingan manusia. Agama menjadi salah satu sumber konflik, karena semua agama hanya belajar dari “broker” agama, bukan langsung dari Tuhan. Agama sebenarnya telah gagal menyelesaikan konflik. Agama hanya akan bisa menciptakan perdamaian apabila agama tersebut bisa meredam konflik dalam agamanya sendiri tanpa kekerasan. Bahkan pemuka agama yang seharusnya menjadi peacemaker, malah menjadi violencemaker. Agama bisa menjadi resolusi jika agama berbicara tentang hubungan horizontal. Misalnya integritas, demokrasi, hak asasi manusia, dst. Agama dalam batas-batas tertentu bisa membuat jejaring untuk perdamaian. 3. Apabila terlibat dalam konflik, kita cenderung menyalahkan pihak lain / the others. Padahal menurut Jacques Derrida, konflik sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri / the self. Jadi perdamaian harus bermula dari diri kita sendiri. Ada kecenderungan dalam suatu konflik tingkat rasionalitas para pihak menurun. The self dan the others sama-sama kurang rasional.

Karl Armstrong menyatakan perdamaian berkaitan dengan compassion. Kita harus belajar berbelas kasih sejak dini. Kita harus menepung diri kita, apa yang membuat diri kita sakit, jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Resolusi konflik atau perdamaian dimulai dari diri kita sendiri. Perdamaian dalam perspektif Rene Girard dapat diciptakan lewat kultur tanpa dendam (sikap tidak menyimpan dendam), tanpa kambing hitam (menyalahkan pihak lain), tanpa ketakutan, dan tanpa ancaman kekerasan. Perspektif ini diterapkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Mandela yang pernah di tahan puluhan tahun oleh lawan politiknya, namun ketika bebas dan terpilih jadi

pimpinan / Presiden di Afrika Selatan, Mandela tidak membalas dendam kepada lawan politiknya. Mandela bisa menyelesaikan konflik di Afrika Selatan dengan kultur tanpa dendam. Adalah hal yang pantas Mandela memperoleh Nobel Perdamaian. Dalam social capital, perdamaian di masyarakat dapat tercipta lewat memperkuat modal sosial berupa kepercayaan, jaringan dan norma sosial. Menurut Francis Fukuyama, masyarakat yang dibangun atas dasar kepercayaan (seperti Italia Utara) lebih mudah membangun perdamaian, pemerintah yang bersih, dan partisipasi sosial yang tinggi. Sebaliknya masyarakat yang dibangun atas dasar ketidakpercayaan (seperti Italia Selatan) sarat dengan konflik, pemerintahan korup, dan partisipasi sosial yang rendah.

Robert Putnam dalam buku *Bowling Alone* menjelaskan pentingnya jaringan pengikatan (*bonding social capital*) dan jaringan pen jembatanan (*bridging social capital*). Jaringan pengikatan berupa ikatan primordial seperti kesamaan suku, etnis dan agama. Sedangkan jaringan pen jembatanan berupa hubungan antar komunitas yang berbeda. Memperkuat jaringan-jaringan sosial ini diyakini akan mempermudah perdamaian. Akhirnya, norma sosial juga bisa memperkuat modal sosial. Norma sosial yang mendukung perdamaian haruslah dipertahankan, dan sebaliknya norma sosial yang mengarah kepada perpecahan harus dihindari bahkan ditiadakan.

Karakter secara terminologi adalah tabiat: watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti membedakan seseorang daripada yang lain (Kamus Poerwadarminta). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap individu memiliki sifat dan perilaku yang berbeda yang terbentuk setelah dia lahir dan mendapatkan pengaruh dari keluarga, lingkungan dan pendidikan yang membentuk pola berpikir, pola bersikap, pola berperilaku yang pada akhirnya membentuk watak individu tersebut menjadi sebuah karakter yang bersifat kuat permanen dan menetap. Menurut bambang Nurokhim (artikel *Cakrawala TNI AL*, 2007:3) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Pembentukan karakter dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu oleh keluarga, sekolah dan lingkungan. Keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak, karena anak lebih mempunyai banyak waktu dengan kedua orang tua. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya sifat dan perilaku seorang anak tidak jauh berbeda dari sifat dan perilaku orang tuanya. Tomas linckona menyatakan bahwa kita hidup dalam dunia dimana media mengendalikan kultur dengan mempromosikan pertentangan dan hedonisme serta menghancurkan nilai-nilai yang dapat membangun karakter yang baik. Keluarga-keluarga di dunia sekarang lebih stres dan terpecah belah lebih dalam dari sebelumnya dan lebih sedikit waktu untuk berinteraksi diantara anggota keluarga mereka sendiri untuk mewariskan nilai-nilai luhur pada pembentukan karakter anak. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa generasi penerus bangsa sekarang pembentukan karakternya banyak dipengaruhi oleh media massa dimana informasi, konten dan materi dari media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pada realitanya

hidup tidak selalu berjalan dengan baik, maka peran keluarga sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak akan tetapi keluarga yang tidak memahami cara mendidik dan membimbing seorang anak mereka lebih sibuk dengan urusan keseharian dan dunia mereka sendiri. Padahal keluarga berperan penting dalam membentuk karakter penerus bangsa untuk menjadikan karakter yang baik demi menjadikan bangsa ini lebih bersih, kuat dan berjaya di masa depan.

Pendekatan kultural bersifat humanis dalam memandang manusia sebagai entitas yang utuh baik secara fisik maupun spiritual. Hidup manusia tidak hanya berkaitan dengan urusan fisik tetapi juga berkaitan dengan aspek kultural dalam diri manusia (Dr Junaidi 2012). Pendekatan kultural memiliki keunggulan bila diaplikasikan dalam pembentukan karakter. Pertama, bersifat holistik. Manusia memiliki jiwa dan raga. Bahkan hakekat manusia itu ada pada jiwanya sehingga pendekatan kultural melalui keluarga bisa membantu seseorang untuk membentuk karakter yang lebih baik. Manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki kebudayaan dan dikaruniai potensi kreatifitas untuk dapat bertahan hidup di alam semesta. Dalam menjalankan kreatifitasnya manusia memiliki sistem moral, rasa, etika, nilai-nilai, adat, tradisi, etika, dan estetika. Pada dasarnya sifat manusia yang tidak pernah puas dengan yang mereka miliki dan mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi dengan adanya pendekatan kultural diharapkan bisa menjadi alat atau perisai manusia tersebut untuk membatasi kreatifitas sehingga dapat mengendalikan perbuatan atau sikap yang buruk, dan rasa kasih sayang terhadap orang lain tinggi, sehingga dapat meningkatkan martabat manusia. Kedua, bersifat partisipatif. Pendekatan kultural memberikan ruang yang lebih luas kepada keluarga atau masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembentuka karakter. Keluarga diposisikan sebagai subjek utama sehingga peran keluarga sangat penting untuk pembentukan karakter. Ketiga, pendekatan kultural memberikan penghargaan pada kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat. Setiap keluarga atau masyarakat memiliki tradisi-tradisi luhur yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk karakter. Keempat, pendekatan kultural sangat menghargai perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan ini mendukung pluralisme sehingga keberagaman budaya, bangsa, agama, dan etnis tidak menjadi hambatan dalam pembentukan karakter. Justru, sebaliknya keberagaman menjadi kekuatan besar untuk mendukung pembentukan karakter yang lebih baik sehingga menjadikan manusia lebih beradab. Keberagaman dalam keteraturan membuat setiap orang merasa dihargai sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup. Kelima, pendekatan kultural memberikan penekanan pada aspek hubungan manusia atau human relation. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dengan sesama manusia. Menjalin hubungan dengan sesama manusia sangat perlu dilakukan dalam pembentukan karakter. Keenam, pendekatan kultural sangat memperhatikan keseimbangan alam. Alam dan kebudayaan merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kebudayaan itu dikreasikan manusia untuk dapat beradaptasi dengan alam. Dengan kemajuan teknologi sifat manusia menjadi lebih serakah dimana eksploitasi alam semakin meningkat karena

ditunjang oleh teknologi yang memudahkan untuk dapat meneksplotasi alam. Hal ini tidak benar, karena semakin alam dieksplotasi maka bencana alam sering terjadi, contohnya banjir dan membuat pemanasan global. Dalam hal ini pendekatan kultural sangat penting untuk membentuk karakter manusia sehingga bisa membentuk manusia yang bermartabat.

Pendekatan sosial dan ekonomi; Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana. Menurut penulis pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.

Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh dimata dunia. Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali. Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama. Yang jadi pertanyaan dibenak penulis terhadap Negara-negara adidaya, katanya cinta damai tapi mengapa terus berlomba-lomba membuat senjata perang yang super canggih dan mematikan yang bersifat masal.

Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranya kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan ber-Tuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki charisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian.

Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi Internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.[2] Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota

(*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB.

Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/491 (V) tentang “Penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di PBB”. Kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November, 1949). Pada masa konfrontasi Indonesia – Malaysia pada Januari 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB. Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada sekretaris Jenderal PBB atas keputusannya “Untuk melanjutkan kerja sama penuh dengan PBB, dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis.

Aktivitas Indonesia dan PBB : Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB. Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk 11 periode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai wakil pada tahun 1969, 1999, dan 2012. Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006.

Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut : menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Konferensi Asia-Afrika : Indonesia menjadi salah satu pelopor teretusnya konferensi Asia-Afrika yang tujuannya adalah menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerja sama antar Negara serta menentang segala bentuk penjajahan.

Konferensi ini dipelopori oleh menteri luar negeri Indonesia pada saat itu, Ali Sastromidjojo, beserta 4 pemimpin Negara lainnya Pakista, India, Bangladesh, dan Myanmar yang kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika lainnya. Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang

anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa. Sejak misi pertamanya tahun 1957, Kontingen Garuda sampai sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda adalah Negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak. Negara Asean seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Juga Negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia.

Gerakan Non-Blok (1961); Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok, sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan beberapa pemimpin Negara lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi yang muncul menanggapi terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Saat ini organisasinya beranggotakan 120 negara. Membentuk ASEAN (1967) ; Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai. Kedua Negara bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antar Negara di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan.

Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang) ; Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang memiliki peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cina Selatan. Indonesia pada akhirnya menginginkan Negara-negara yang terlibat untuk merumuskan Code Of Conduct, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan di wilayah sangketa. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008, pada masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan diakui dunia. Menyerukan keterlibatan Internasional yang berimbang dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlemen perdamaian yang ditetapkan PBB.

Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di berbagai Negara, Thailand Berdamai saat Era Soeharto, Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di Mindanao. Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina. Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja; Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan Kamboja. Indonesia

sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian membawa masalah Mindanao ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam, dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya pengalaman menengahi konflik di Kamboja.

Konflik Kamboja dan Vietnam; Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam.

Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar; Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik etnis Rohingya dengan Myanmar. Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan konflik teraebut. Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah ini. Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

## Kesimpulan

Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri diseluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan Negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu Negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap priode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional. Politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu Negara tak terlepas dari kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu Negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subyek-subyek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

---

### Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Taniredja, Tukiran dan Kawan-kawan. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.